

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2011-2015***ANALISIS FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT OF SOUTH MINAHASA REGENCY  
OF BUDGET YEAR 2011-2015*

Oleh:

**Aldy H. R. Pangkey<sup>1</sup>****Ivonne S. Saerang<sup>2</sup>****Joy E. Tulung<sup>3</sup>**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[1aldypangkey.ap@gmail.com](mailto:aldypangkey.ap@gmail.com)[2ivonesaerang@yahoo.com](mailto:ivonesaerang@yahoo.com)[3joytia2004@yahoo.com](mailto:joytia2004@yahoo.com)

**Abstrak:** Analisis terhadap kinerja keuangan daerah khususnya Kabupaten Minahasa Selatan, merupakan informasi yang penting dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang positif dan transparan, terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola keuangan negara adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio, data yang digunakan adalah kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, Rasio Kemandirian PAD menunjukkan tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Rasio tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah daerah masih rendah namun dilihat dari Rasio Efektifitas PAD tingkat Efektifitas pengelolaan keuangan daerah terbilang sangat efektif dan dari rasio keserasian belanja daerah menunjukkan keseimbangan antar belanja masih belum seimbang. Penyebabnya adalah potensi yang dimiliki masih kurang dikelola oleh pemerintah. Jika potensi-potensi berhasil di maksimalkan, maka pajak yang merupakan penopang utama PAD akan semakin meningkat, dan akan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati setiap pembangunan fisik yang disediakan pemerintah daerah.

**Kata Kunci :** analisis kinerja keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD)

**Abstract:** The analysis of financial performance especially in South Minahasa Regency, is providing an important information in making positive and transparent local financial management to run the welfare of society. One of the ways to analyze the government's financial is to run an analysis the financial ratio. The purpose of this study is to find out the financial performance capabilities of the local Government of South Minahasa Regency from 2011 until 2015. The research method used is quantitative descriptive to measure the financial performance with ratio, the data used is in the form of Budget Realization Report. The results of the research reveals that, the PAD Self-Reliance Ratio shows the low level of regional independence. The ratio of the level of decentralization Fiscal local government is still under a low but The Ratio Effectiveness of local financial management is overall very effective. The ratio evenness regional spending shows the balance between spending shows the balance between spending is still not balanced. This happened because the government has managed their potential sufficiently well. If the potentials are maximized managed, then the tax as the main pillar of PAD will increase, and become a benchmark of the welfare level of the community, so that the community can enjoy every physical development provided by the local government.

**Keywords:** financial performance analysis, local government financial performance, revenue (PAD)

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah di capainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah

Dalam Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pengertian Otonomi daerah adalah merupakan suatu hak dan kewajiban dalam mengambil keputusan untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan potensi-potensi dalam suatu daerah. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan desentralisasi fiskal.

Kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan permasalahan yang muncul setelah adanya otonomi di Indonesia. Sejak diberlakukan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratis nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan diperlukan kemampuan finansial daerah yang mandiri.

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas kinerja keuangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Terdapat dua alasan utama mengapa Pemerintah Daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, (Mahmudi,2016:2) yaitu:

1. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kinerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggung jawaban Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah kepada pegawai pemda-pemda dan DPRD.
2. Dilihat dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggung jawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan seperti : Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, dan Rasio Keserasian Belanja.

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, dan Rasio Keserasian Belanja Daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Mahmudi (2016:25).

### **Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Mardiasmo (2012:121)* dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

- 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### **Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah *Mahsun (2011:158)* :

#### 1) Indikator Masukan (Inputs)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

#### 2) Indikator Proses (Process)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

#### 3) Indikator Keluaran (Output)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

#### 4) Indikator Hasil (Outcome)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

#### 5) Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

#### 6) Indikator Dampak (Impact)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut *Mahsun (2011:81)* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Analisis Kinerja Keuangan

Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya Halim (2012:230).

Untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, berbagai analisis rasio keuangan sebagai berikut:

### 1. Rasio Kemandirian

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

### 2. Derajat Desentralisasi Fiskal

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### 4. Rasio Keserasian Belanja

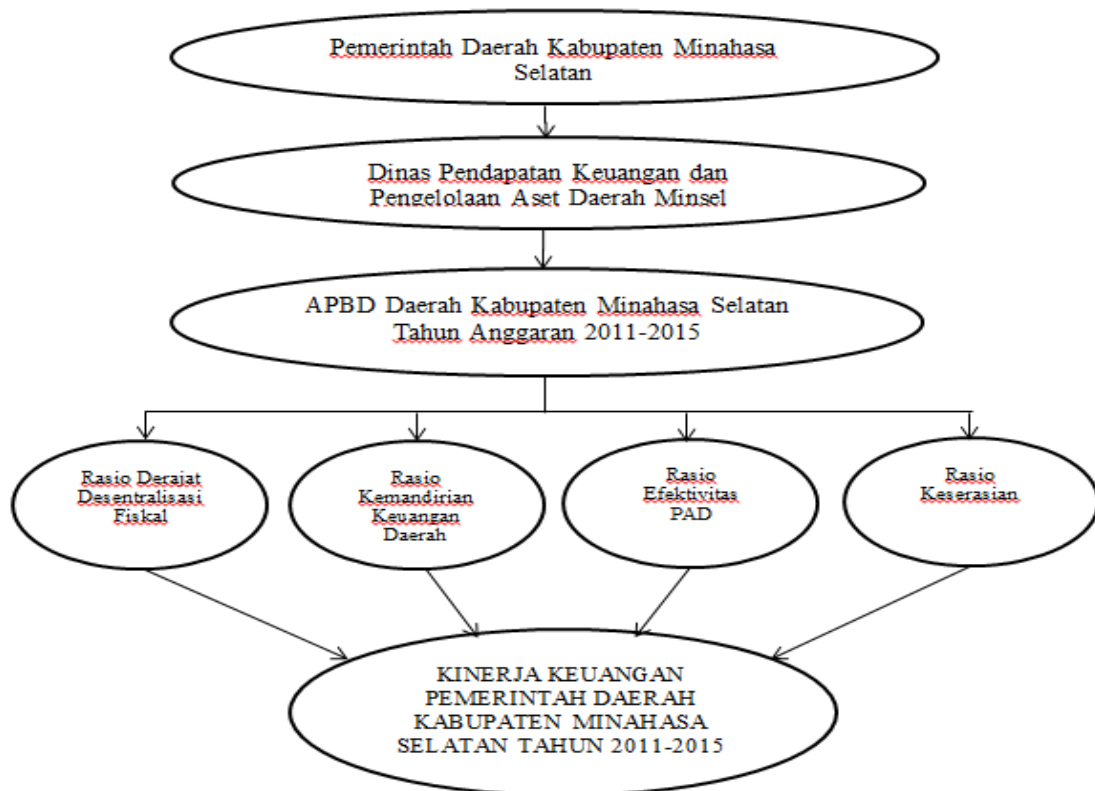
$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## Penelitian Terdahulu

Saputra (2016) Dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2010-2014. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam mengelola APBD tahun Anggaran 2010-2014, Metode penelitian menggunakan Deskriptif Kuantitatif. Dari hasil uji Variasi pendapatan termasuk dalam kondisi baik, rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, rasio kemandirian keuangan termasuk dalam kategori rendah sekali, rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif, variansi belanja termasuk dlm kategori baik, rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak dari pada belanja operasi rasio belanja termasuk dalam kategori efisien.

Rahmawati Ema (2013) Dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2010-2012, Metode penelitian menggunakan Deskriptif Kuantitatif. Dari hasil uji Tingkat kemandirian tergolong rendah sekali, tingkat efisiensi PAD tergolong tidak efisien, tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan positif, rata-rata tingkat belanja daerah pemerintah Sumbawa tergolong ekonomis.

**Kerangka Konseptual Penelitian****Gambar 1. Kerangka Konseptual***Sumber: Kajian Teori 2017***METODE PENELITIAN****Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Deskriptif Kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

**Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Pondang, Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Sleatan Provinsi Sulawesi Utara pada bulan april, mei, dan juni 2017

**Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Data Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2011-2015 dan Objek Penelitian adalah Pemerintah DPKPAD Kabupaten Minahasa Selatan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi.

Data umum :

1. Gambaran Umum Kabupaten Minahasa Selatan
2. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

Data khusus :

1. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2015.

**Teknik Analisis**

Metode analisis data, untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011 sampai 2015, maka dilakukan pengujian dengan empat variabel, kemandirian daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektifitas, dan Keserasain Belanja, untuk mengukur tingkat kinerja keuangan dari tiap-tiap variable.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian****Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi atau Pendapatan Transfer dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011 sampai 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rasio Kemandirian APBD Kabupaten Minsel Tahun Anggaran 2011-2015 (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2011	9.407.280.004	404.080.565.693	2,32%	Instruktif
2012	10.620.087.945	470.898.873.627	2,25%	Instruktif
2013	14.406.092.809	518.402.298.599	2,77%	Instruktif
2014	26.137.234.620	559.006.861.881	4,67%	Instruktif
2015	31.965.750.688	826.730.743.714	3,86%	Instruktif
Nilai Rata-rata			3,17%	

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPKPAD Kabupaten Minsel (Data di Olah)

Rasio kemandirian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2011: } \frac{9,407,280,004}{404,080,565,693} \times 100\% = 2,32\%$$

$$\text{Tahun 2012: } \frac{10,620,087,945}{470,898,873,627} \times 100\% = 2,25\%$$

$$\text{Tahun 2013: } \frac{14,406,092,809}{518,402,298,599} \times 100\% = 2,77\%$$

$$\text{Tahun 2014: } \frac{26,137,234,620}{559,006,861,881} \times 100\% = 4,67\%$$

$$\text{Tahun 2015: } \frac{31,965,750,688}{826,730,743,714} \times 100\% = 3,86\%$$

**Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Berdasarkan hasil perhitungan normative dari data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Mianahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015, maka Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2011-2015 adalah sebagai berikut

**Tabel 2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015 (Dalam Rupiah)**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
2011	9.407.280.004	515.891.352.257	1,82%	Sangat Kurang
2012	10.620.087.945	537.329.647.572	1,98%	Sangat Kurang
2013	14.406.092.809	604.614.969.408	2,38%	Sangat Kurang
2014	26.137.234.620	684.371.721.501	3,82%	Sangat Kurang
2015	31.965.750.688	868.991.454.402	3,68%	Sangat Kurang
Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal			2,73%	

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPKPAD Kabupaten Minsel (Data di Olah)

Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2011: } \frac{9.407.280.004}{515.891.352.257} \times 100\% = 1,82\%$$

$$\text{Tahun 2012: } \frac{10.620.087.945}{537.329.647.572} \times 100\% = 1,98\%$$

$$\text{Tahun 2013: } \frac{14.406.092.809}{604.614.969.408} \times 100\% = 2,38\%$$

$$\text{Tahun 2014: } \frac{26.137.234.620}{684.371.721.501} \times 100\% = 3,82\%$$

$$\text{Tahun 2015: } \frac{31.965.750.688}{868.991.454.402} \times 100\% = 3,68\%$$

### Rasio Efektifitas PAD

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015, maka Rasio Efektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Rasio Efektifitas APBD Kabupaten Minsel Tahun Anggaran 2011-2015 (dalam rupiah)**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria Rasio Efektifitas
2011	9.407.280.004	11.843.237.500	79,43%	Kurang Efektif
2012	10.620.087.945	8.499.800.000	124,95%	Sangat Efektif
2013	14.406.092.809	13.435.194.704	107,23%	Sangat Efektif
2014	26.137.234.620	22.457.922.250	116,38%	Sangat Efektif
2015	31.965.750.688	33.686.537.650	94,89%	Cukup Efektif
Rata-rata Rasio Efektifitas			104,57	

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPKPAD Kabupaten Minsel (Data di Olah, 2017)

Rasio efektifitas Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2011: } \frac{9,407,280,004}{11,843,237,500} \times 100\% = 79,43\%$$

$$\text{Tahun 2012: } \frac{10,620,087,945}{8,499,800,000} \times 100\% = 124,95\%$$

$$\text{Tahun 2013: } \frac{14,406,092,809}{13,435,194,704} \times 100\% = 107,23\%$$

$$\text{Tahun 2014: } \frac{26,137,234,620}{22,457,922,250} \times 100\% = 116,38\%$$

$$\text{Tahun 2015: } \frac{31,965,750,688}{33,686,537,650} \times 100\% = 94,89\%$$

## Rasio Keserasian Belanja

### 1. Rasio Belanja Belanja Operasi

Berdasarkan hasil normative dari data Total Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015, maka Rasio Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rasio Belanja Operasi APBD Kabupaten Minsel Tahun Anggaran 2011-2015 (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Tidak Langsung
2011	399.282.253.916	483.807.278.567	82,52%
2012	418.336.693.544	525.891.166.484	79,54%
2013	458.745.129.615	561.242.693.084	81,73%
2014	556.213.835.443	689.167.009.246	80,70%
2015	610.295.890.874	808.444.061.825	75,49%
Rata-rata Rasio Belanja Tidak Langsung			79,99%

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPKPAD Kabupaten Minsel (Data di Olah, 2017)

Rasio belanja operasi Kabupaten Minsel sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2011: } \frac{399.282.253.916}{483.807.278.567} \times 100\% = 82,52\%$$

$$\text{Tahun 2012: } \frac{418.336.693.544}{525.891.166.484} \times 100\% = 79,54\%$$

$$\text{Tahun 2013: } \frac{458.745.129.615}{561.242.693.084} \times 100\% = 81,73\%$$

$$\text{Tahun 2014: } \frac{556.213.835.443}{689.167.009.246} \times 100\% = 80,70\%$$

$$\text{Tahun 2015: } \frac{610.295.890.874}{808.444.061.825} \times 100\% = 75,49\%$$



## 2. Rasio Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Total Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015, maka Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Minsel adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rasio Belanja Modal APBD Kabupaten Minsel Tahun Anggaran 2011-2015 (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Langsung
2011	84.390.024.651	483.807.278.567	17,44%
2012	107.544.472.940	525.891.166.484	20,45%
2013	102.467.563.469	561.242.693.084	18,25%
2014	132.953.173.803	689.167.009.246	19,29%
2015	197.917.924.233	808.444.061.825	24,48%
Rata-rata Rasio Belanja Langsung 19,98%			

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPKPAD Kabupaten Minsel (Data di Olah)

Rasio belanja modal Kabupaten Minsel sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2011: } \frac{84.390.024.651}{483.807.278.567} \times 100\% = 17,44\%$$

$$\text{Tahun 2012: } \frac{107.544.472.940}{525.891.166.484} \times 100\% = 20,45\%$$

$$\text{Tahun 2013: } \frac{102.467.563.469}{561.242.693.084} \times 100\% = 18,25\%$$

$$\text{Tahun 2014: } \frac{132.953.173.803}{689.167.009.246} \times 100\% = 19,29\%$$

$$\text{Tahun 2015: } \frac{197.917.924.233}{808.444.061.825} \times 100\% = 24,48\%$$

## Pembahasan

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 dapat digolongkan rendah yaitu : pada tahun 2011 sebesar 2,76%, pada tahun 2012 turun sebesar 0,5% menjadi 2,26%, tahun 2013 hanya naik sebesar 0,02% menjadi 2,28%, tetapi pada tahun 2014 naik drastis sebesar 2,4 % menjadi 4,68%, dan tahun 2015 turun sebesar 0,81% menjadi 3,87%, dan nilai rata-rata tingkat kemandirian Pemkab Minsel 3,17%

Karena realisasi berada rata-rata 3,17%, Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer atau tingginya bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dapat dikatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Minsel masih sangat bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minsel masih belum optimal dalam menggali potensi daerah Kabupaten Minsel. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah, serta menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minsel juga ikut meningkat, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minsel terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi semakin berkurang.

### **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dikatakan sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil. Peningkatan PAD setiap periodenya menunjukkan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Akan tetapi, ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat tergolong besar. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, serta peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri kurang dari 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.

### **Rasio Efektifitas**

Dari keseluruhan hampir semua periode tingkat efektifitasnya dikatakan sangat efektif, kecuali tahun 2011 yang tingkat efektifitasnya hanya termasuk dalam kriteria kurang efektif, tahun 2015 tingkat efektifitasnya masuk dalam kriteria cukup efektif. Rata-rata Rasio Efektifitas Kabupaten Minsel selama periode 5 tahun sebesar 104,57%. Dengan jumlah tersebut, menurut kriteria Rasio Efektifitas, tingkat Efektifitas Kabupaten Minsel di katakana Sangat Efektif. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik.

### **Rasio Keserasian Belanja**

#### **Rasio Belanja Operasi**

Dilihat dari data yang tercantum dalam tabel dan grafik, Rasio Belanja Operasi Kabupaten Minsel Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015 pada awal periode, yaitu tahun 2011 Rasio Belanja Operasi tergolong tinggi yaitu 82,52%. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu tahun 2012, Rasio Belanja Operasi turun sebesar 2,98% menjadi 79,54%, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013 naik sebesar 2,19% menjadi 81,73%, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,03%, pada akhir periode yaitu pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 5,21%. Rata-rata Rasio Belanja Operasi Kabupaten Minsel selama periode 5 tahun sebesar 79,99% Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Operasi dibandingkan untuk kegiatan Belanja Modal.

#### **Rasio Belanja Modal**

Dilihat dari data yang tercantum dalam tabel dan grafik, Rasio Belanja Modal Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011 sampai 2015, pada tahun 2011 yaitu 17,44% , pada tahun selanjutnya tahun 2012 naik sebesar 3,01% menjadi 20,45%, pada tahun 2013 turun sebesar 2,2% menjadi 18,25%, pada tahun 2014 naik sebesar 1,04% menjadi 19,29%, dan pada akhir periode yaitu pada tahun 2015 naik sebesar 5,55% menjadi 24,48%. Rata-rata Rasio Belanja Modal kabupaten Minsel selama periode 5 tahun sebesar 19,98%. Ini berarti Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lebih sedikit menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Modal dibandingkan untuk Blanja Operasi.

Dilihat dari perhitungan Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal, Pemerintah Daerah Lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Operasi dibandingkan dengan kegiatan Belanja Modal. Semestinya Belanja Modal lebih besar dari Belanja Operasi Kedua Rasio tersebut selisih 60,01%. Berarti pemerintah Daerah seharusnya bisa meningkatkan Belanja Modal agar kualitas *outputnya* meningkat, agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dilihat dari kinerja pengelolaan keuangan Pemkab Minsel berdasarkan rasio kemandirian masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Ini terlihat dari hasil rata-rata Rasio Kemandirian Kabupaten Minsel tahun anggaran 2011-2015 adalah sebesar 3,26%. Ini menunjukkan bahwa, peran Pemerintah Pusat dan Provinsi sangat dominan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Minsel. Mengingat peran Pemerintah Pusat dan Provinsi yang masih sangat dominan, wajar jika Derajat Desentralisasi

Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Minsel masih kurang. Ini terlihat dari rata-rata rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode 5 tahun hanya berjumlah 2,73%. Artinya, Pemerintah Pusat dan Provinsi memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang kecil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minsel. Namun, tingkat Efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minsel terbilang sangat Efektif. Ini terlihat dari tingginya angka rata-rata Rasio Efektifitas yang berjumlah 104,57% selama periode 5 tahun anggaran. Rasio Kecerahan Belanja menunjukkan bahwa Kecerahan Belanja belum seimbang. Terbukti dari perhitungan Rasio belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal, pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Operasi dibandingkan dengan kegiatan Belanja Modal. Semestinya Belanja Modal lebih besar dari Belanja Operasi.

### Saran

Dalam mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan PAD dan memperbaiki kinerja keuangan dengan menggali potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa Selatan, karena mempunyai dampak yang besar, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat. Potensi tersebut misalnya pendirian BUMD sektor potensial seperti Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan Pariwisata, Industri, export import barang dan jasa. Jika pemerintah berhasil memaksimalkan atau digarap dengan serius mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan PAD, dan juga harus ada partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, maka pajak yang merupakan penopang utama dalam meningkatkan PAD akan semakin meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, pemerintah hendaklah memberi informasi secara rinci kepada masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai pembayar pajak dan retribusi, karena tidak semua masyarakat mengetahui rincian kewajiban jumlah pajak dan retribusi yang harus dibayarkan. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi supaya tidak terjadi kecurangan. Karena besarnya pajak dan retribusi tidak hanya sebagai komponen utama untuk meningkatkan PAD, tetapi juga sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati setiap pembangunan-pembangunan fisik yang disediakan pemerintah daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. (2016). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahsun, Mohammad. (2012), *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2012), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andy. Yogyakarta
- Halim, Abdul. (2007), *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2012), *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Saputra Sandy, Suwendra I Wayan, Yudiaatmaja Fridayana, (2016), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *Jurnal Manajemen* <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJM/article/viewFile/6720/458>. Diakses tanggal 23 April 2017.
- Rahmawati Erna, (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *Jurnal Akuntansi* <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17858/13946>. Diakses tanggal 6 Mei 2017.